

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semua perusahaan berharap akan mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi. Nilai perusahaan yang baik menggambarkan kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan mampu dalam menggambarkan kesejahteraan. Salah satu indikator untuk melihat nilai perusahaan baik dapat dilihat dari *good corporate governance*. *good corporate governance* mampu menggambarkan perusahaan dalam kondisi baik

Istilah "tata kelola perusahaan" atau "tata kelola perusahaan" sering digunakan. Kata "governance" berasal dari bahasa Perancis, yang berarti "pengendalian". Selama bertahun-tahun, istilah "governance" telah menjadi sangat populer dalam konteks kegiatan perusahaan, dan istilah "tata kelola" dapat digunakan dalam bahasa Indonesia. Tata kelola perusahaan yang baik disebut tata kelola perusahaan yang baik (GCG), dan tata kelola perusahaan yang buruk disebut tata kelola perusahaan yang buruk (BCG).

Saat ini, orang-orang ingin memiliki tata kelola yang baik, terutama mereka yang bekerja di sektor publik. Ini terjadi karena ketidakpuasan dengan kinerja sektor pelayanan publik, baik pemerintah maupun swasta. Bermasalahnya tata kelola saat ini menyebabkan berbagai jenis kecurangan dan kejahatan.

Kinerja lembaga, baik sektor publik maupun non publik, menurun karena tata kelola yang tidak baik. Melihat pentingnya tata Kelola ini, bukan saja pada lingkup publik, tetapi juga penting diterapkan dalam dalam lingkup gereja sebagai salah satu lembaga masyarakat, khususnya juga pada Lembaga Gereja Protestan Indonesia di Papua.

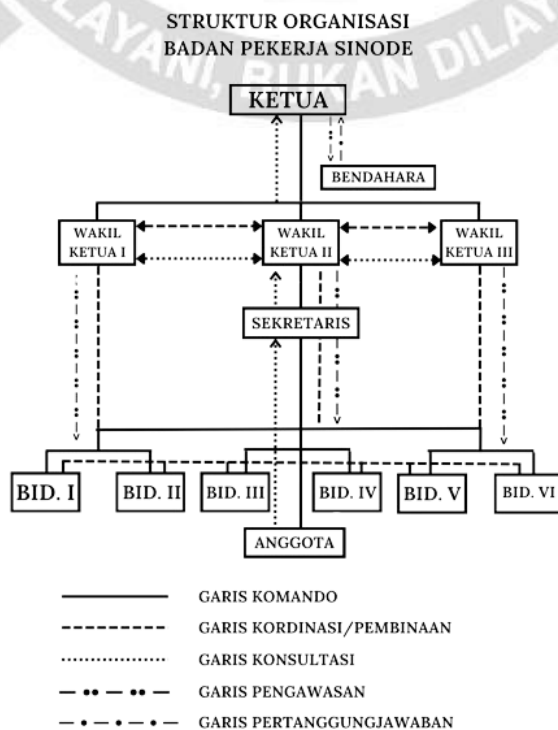
Gereja Protestan Indonesia di Papua (disingkat GPI Papua) adalah satu dari 12 gereja- gereja mandiri dari tubuh Indische Kerk/ Gereja Protestan Indonesia. GPI di Papua lahir 25 Mei 1985 dari hasil penginjilan beberapa badan *zending*, seperti: NZG (1797), UZV (1860), perkumpulan Biji Sesawi

dan Ora et Labora (1930), GPM (1935) dan ZPM (1936). Setelah berdiri dan berkembang, GPI Papua ini terdaftar di Ditjen Bimas Kristen tahun 1989 dan didaftar ulang tanggal 2 Februari 2009.

Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) merupakan salah satu denominasi Gereja yang ada di Tanah Papua. Di dalam GPI Papua terdapat 20 Klasis dan 376 persekutuan jemaat. Jemaat pada Klasis ini bertumbuh sangat pesat. Anggota Jemaat terdiri dari berbagai suku, jenjang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda.

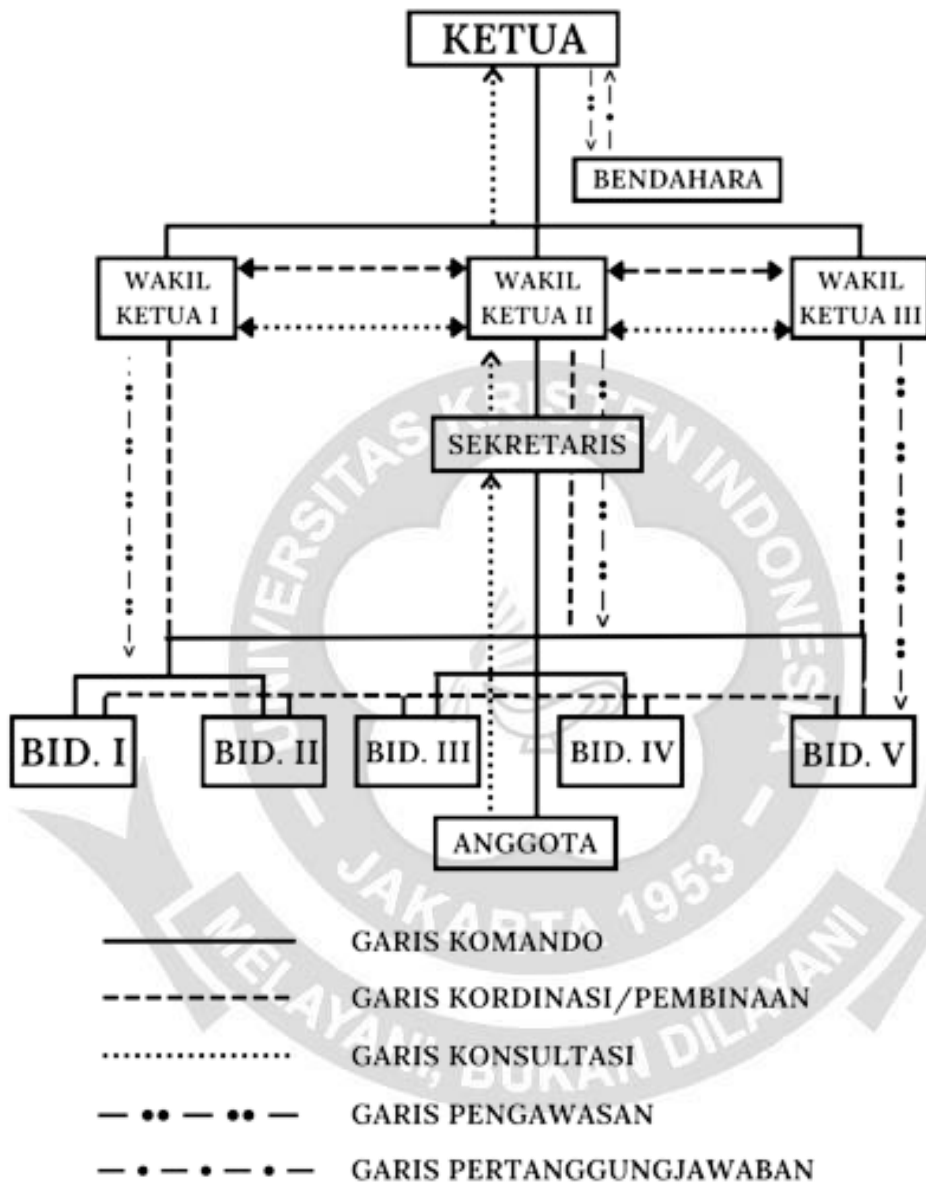
GPI Papua berada dalam kepelbagaian, tetapi terpanggil dalam satu kesatuan untuk mengembangkan pelayanan di setiap jenjang pelayanan. Esensi pelayanan dalam GPI Papua dapat dilihat pada struktur organisasi, termasuk operasional struktur kelembagaan.

Kegiatan operasional kelembagaan GPI Papua memiliki struktur organisasi yang berjenjang dari lingkup Sinodal, Lingkup Klasikal dan Lingkup Jemaat. Adapun gambaran struktur seperti berikut ini:



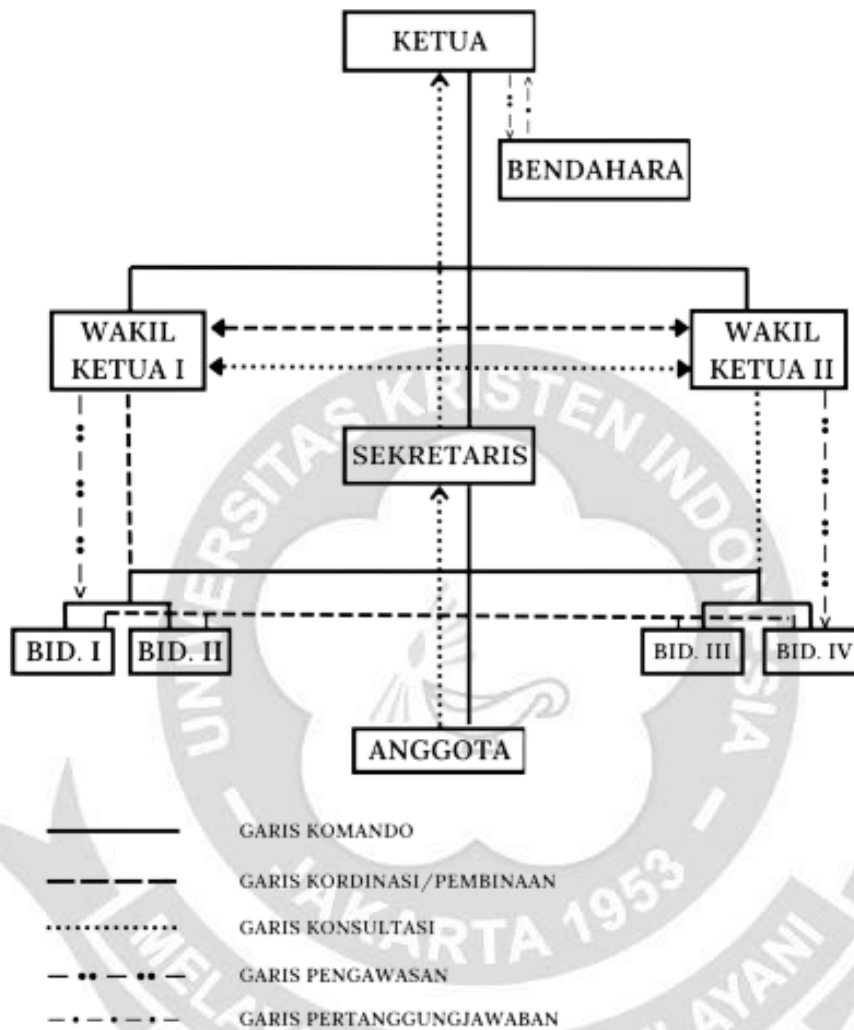
Struktur Organisasi Badan Pekerja Sinode
(Gbr 1)

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEKERJA KLASIS



Struktur Organisasi Badan Pekerja Klasik
(Gbr 2)

STRUKTUR ORGANISASI BADAN MAJELIS JEMAAT



**Struktur Organisasi Badan Majelis Jemaat
(Gbr 3)**

Tampilan struktur di atas memperlihatkan dan memaparkan fungsi-fungsi penerapan tupoksi yang berlangsung secara berjenjang mulai dari Jemaat, Klasis dan Sinode serta prinsip komando, koordinasi, konsultasi, pengawasan dan pertanggung jawaban dilaksanakan secara terstruktur oleh ketua sampai kepada bidang-bidang tugas lainnya. Bahkan pelaksanaan tupoksi mengacu pada visi dan misi GPI Papua yaitu *“Menjadi Sebuah Institusi yang Tersusun Rapi, Persekutuan yang Utuh Setiap Beribadah, Bersaksi dan Melayani Serta*

Kehadirannya menjadi Berkat” dengan Misi yaitu melayani dengan sebuah kebersamaan yang kokoh serta menjadikan Papua sebagai zona damai dalam rumah bersama.

Dengan Visi dan Misi diatas maka GPI Papua terus Bersaksi, Bersekutu dan Melayani di atas Tanah Papua dengan Motto “*Nos Autem Praedicamus Christum Crucifixum*” artinya Kami Memberitakan Kristus yang Tersalip. Motto ini sebagai landasan pijak lembaga GPI Papua melangsungkan seluruh Tatanan Penyelenggaraan pelayanan dan keuangan serta administrasi di GPI Papua.

Kenyataan membuktikan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, masih jauh dari harapan bahkan ada juga kekeliruan dalam administrasi, apalagi di bidang keuangan masih jauh dari yang diharapkan. Dari semua yang dilakukan ini berdampak pada risiko yang dialami oleh gereja dalam penerapan tata kelola pelayanan dari sisi organisasi. Sebab sistem yang digunakan dalam menerapkan pelayanan dan keuangan masih menggunakan sistem *Desentralisasi* sehingga pengelolaan administrasi maupun keuangan masih berlangsung secara tidak merata. Bahwa Klasis-klasis di pusat Provinsi dan Kabupaten dalam tata Kelola administrasi bahkan pengelola Keuangan, dan Pelayanan tidak merata atau tidak sama seperti yang dikelolah oleh Klasis-klasis dan Jemaat-jemaat yang berada di kampung-kampung. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi risiko penerapan sistem yang membuat sehingga pengelolaan administrasi tetapi juga keuangan secara khusus tidak berlangsung secara optimal dan tidak merata.

Dari risiko diatas maka dapat mempengaruhi penerapan pelayanan menjadi tidak maksimal serta pencapaian tujuan organisasi yang tidak dapat dicapai. Semua orang takut menanggung resiko, namun kehidupan ini penuh dengan resiko. Ketika kita berusaha untuk mengelak atau menghindari resiko. Justru disitu kita akan berhadapan dengan resiko yang baru. Sebab resiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ada pepatah yang mengatakan *taka da hidup tanpa resiko*. Aktivitas suatu badan usaha atau perusahaan pada dasarnya tidak dapat dilepaspisahkan dari

aktivitas mengelola resiko. Kata resiko biasanya mempunyai konotasi yang negative bagi setiap orang, karena resiko dapat menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian.

Permasalahan yang muncul yaitu pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang dalam tampilan struktur sehingga mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Bahkan tugas-tugas koordinatif secara berjenjang dari lingkup jemaat khususnya bidang II (keuangan) tidak berlangsung secara optimal yang mengakibatkan putusnya informasi akurat tentang pengelolaan mulai dari penerimaan sampai kepada belanja. Penulis melihat bahwa dari tampilan organisasi ini, GPI Papua adalah sebuah lembaga Gereja yang bersaksi diatas Tanah Papua memiliki instrumen pelayanan yang sangat lengkap, namun prinsip-prinsip manajerial (planing, organising, accounting, controlling) POAC menurut Gorgorius Tery harus berlangsung secara optimal sehingga gerak organisasi berlangsung secara maksimal dengan memberdayakan semua potensi organisasi GPI Papua.

Pengamatan langsung memperlihatkan bahwa pengelolaan dalam perinsip-perinsip manajemen bahkan dalam bidang keuangan gerejawi dilapangan serta beberapa referensi lainnya yang digunakan masih belum berjalan secara optimal dan sempurna seperti yang kita harapkan. Hal ini pun berdampak pada penyimpangan secara administratif, bahkan pada anggaran, dan dana pelayanan dilakukan secara tidak optimal. Dengan demikian terkesan banyak pelayanan yang terbengkalai, disebabkan pelayanan tidak dilakukan oleh penyelenggara pelayanan dengan baik, oleh karena ketidapkahaman tentang tata kelola yang baik.

Pertama, struktur tata kelola tidak berfungsi dengan baik. Diatur secara struktur, masing-masing fungsi di sinode memiliki tugas dan tanggung jawab administrasi, layanan, dan keuangan. Bahkan jika ada bidang lain yang terkait dengan pelayanan dalam lingkup jemaat, prinsip-prinsip perencanaan dan planning program dan anggaran pendapatan dan belanja tidak diperhatikan dan tidak diterapkan dengan baik sebagai standar acuan untuk pelaksanaan pelayanan. Bahkan *organizing* atau penyelenggara

tidak mampu mengorganisir seluruh bentuk sumber daya organisasi maupun manusia sebagai kekayaan organisasi. Selanjutnya prinsip *Acuating* atau pengarahan tidak berlangsung secara normal sehingga masing-masing dalam melaksanakan peran tidak terarah pada tujuan yang akan dicapai serta *controlling* juga tidak dapat berlangsung secara optimal sehingga tidak dapat menemukan kekuatan dan kelemahan sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi. Bahkan Standar Operasi Prosedur yang dibuat pada tingkat sinode tidak diperhatikan oleh jemaat dalam pelaksanaannya. Standar Operasi Prosedur yang berkaitan dengan manajemen keuangan hanyalah slogan. Selain itu, peraturan gereja menetapkan bahwa Ketua Jemaat dan Bendahara Jemaat bertanggung jawab atas keuangan jemaat, tetapi tampaknya tidak ada keselarasan dalam tanggung jawab ini.

Kedua: Mekanisme Tata Kelola, di mana badan pemeriksa keuangan berfungsi sebagai legislatif, tidak berjalan dengan baik. Sebagai internal audit, badan pemeriksa keuangan jemaat tidak independen, sehingga tidak dapat memberikan komentar atau informasi tentang temuan yang ditemukan. Akibatnya, hal ini dibiarkan selama bertahun-tahun. Audit internal gereja tidak dapat membuat program pengawasan yang lengkap dalam satu waktu untuk pengawasan keuangan, operasional, dan pelaksanaan program pelayanan.

Ketiga, tidak ada prinsip tata kelola yang kuat. Tidak mungkin untuk mengukur indikator penilaian untuk menentukan apakah pemerintahan gereja yang baik sudah berjalan sebagaimana mestinya karena dampak dari struktur dan mekanisme pemerintahan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Atas dasar pemaparan di atas, maka sebagai peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PENERAPAN TATA KELOLA GEREJA PROTESTAN INDONESIA DI PAPUA”

1.2 Fokus dan Sub Fokus

Dalam Penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) DALAM GEREJA PROTESTAN INDONESIA DI PAPUA. dan yang menjadi sub fokus adalah:

1. Analisis Manajemen Risiko
2. Penerapan Analisa Manajemen Risiko Tata kelola bidang Adminitrasi, Pelayanan dan keuangan Gereja pada Gereja Protestan Indonesia di Papua ditinjau dari:
 - a. Perencanaan
 - b. Pengorganisasian
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pengendalian (Monitoring dan Evaluasi)

1.3 Rumusan Masalah

Penulis dapat menentukan masalah yang diteliti sebagai berikut berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas:

1. Bagaimana tata kelola bidang adminitrasi, pelayanan dan keuangan Gereja pada Gereja Protestan Indonesia di Papua.
2. Bagaimana tata kelola badan pemeriksa keuangan yang berfungsi sebagai legislatif dan bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengawasi operasi eksekutif dalam situasi ini
3. Bagaimana mitigasi risiko tata kelola bidang adminitrasi, pelayanan dan keuangan Gereja pada Gereja Protestan Indonesia di Papua ditinjau dari:
 - a. Perencanaannya
 - b. Pengorganisasian
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pengendalian (Monitoring dan Evaluasi)

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata kelola bidang administrasi, pelayanan dan keuangan Gereja pada Gereja Protestan Indonesia di Papua.
2. Untuk memetakan tata kelola badan pemeriksa keuangan yang bertindak sesuai fungsi dan peran badan pemeriksa keuangan yang berlaku sebagai legislatif atau bertugas memeriksa dan mengawasi pekerjaan eksekutif.
3. Untuk mitigasi risiko terhadap tata kelola bidang administrasi, pelayanan dan keuangan Gereja pada Gereja Protestan Indonesia di Papua ditinjau dari :
 - a. Perencanaannya
 - b. Pengorganisasian
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pengendalian (Monitoring dan Evaluasi)

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoretis:
 - a. Untuk menambah wawasan dalam memahami dengan benar Analisa Manajemen Resiko Pada Penerapan Tata kelola menjadi fondasi dalam berorganisasi.
 - b. Bagi para Penyelenggara Pelayanan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan pentingnya Analisa Manajemen Resiko dan penerapan Tata kelola dengan baik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai kontribusi bagi Lembaga Gereja Protestan Indonesia di Papua khususnya para penyelenggara pelayanan di lingkup Sinode, Klasis dan Jemaat. dalam penerapan Analisa Manajemen dan Tata Kelola dengan baik.

- b. Sebagai bahan pembinaan untuk setiap penyelenggara pelayanan dalam Lembaga Gereja Protestan Indonesia di Papua untuk dapat berjalan dengan baik.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup pelaksanaan penelitian yaitu GPI Papua secara Sinodal terhadap Ketua Sinode, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III Sinode, Bidang Pelkat, IAI, BINDIK, EKUBANG, KRT, ORTAL, lingkup Sinode, Klasis dan Jemaat.

